

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan merupakan gambaran hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada waktu tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan. Aktivitas-aktivitas ini dicatat dan dirangkum menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan sebagai media untuk melaporkan keadaan dan posisi perusahaan pada pihak yang berkepentingan, terutama pada pihak kreditur, investor, dan manajemen perusahaan itu sendiri (Aminatuzzahra, 2010). Kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan

Informasi yang disajikan dengan benar dalam suatu laporan keuangan, akan sangat berguna bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Untuk menggali lebih banyak lagi informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, diperlukan suatu analisis laporan keuangan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang disebut rasio. Analisis rasio keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan Liora (2014). Analisis laporan keuangan memprediksikan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang, sehingga disinilah laporan keuangan tersebut begitu diperlukan (Azhari, 2014).

Analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan diperlukan untuk mengukur perkembangan dalam menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien (Indarti dan Extaliyus, 2013). Analisis rasio memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan yang akan menunjukkan kondisi sehat tidaknya suatu perusahaan. Analisis rasio yang

digunakan akan menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengevaluasi kinerja manajemen dan pengelolaan keuangan perusahaan untuk memperoleh laba yang dihasilkan (Pongrangga *et al*, 2015).

Masa modern seperti saat ini, perekonomian dunia terus mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia berlomba-lomba menyesuaikan diri agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat dengan menunjang pelayanan secara optimal kepada konsumen. Berbagai sektor industri di Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, juga terus meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat dalam berkonsumsi, seiring dengan perkembangan ekonomi global yang pesat. Peningkatan kebutuhan pelayanan dan produksi ini menyebabkan industri perlu menambah kapasitas aset tetap. Aset tetap yang digunakan dalam proses produksi dan pelayanan dapat dimiliki langsung melalui pembelian atau melalui skema sewa dari penyedia jasa penyewaan aset.

Dalam penyajian laporan keuangan, penggunaan IAS 17 dalam klasifikasi sewa dianggap tidak dapat mencerminkan transaksi sewa secara akurat. Penyewa tidak memiliki kewajiban untuk mengakui aset atau liabilitas atas sewa operasi. Oleh karena itu, IFRS 16 Leasing diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB). Salah satu alasan penerbitan IFRS 16 adalah karena lebih dari 85% dari komitmen sewa perusahaan senilai \$3,3 triliun tidak muncul dalam laporan keuangan ketika masih menggunakan IAS 17. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pembaca laporan keuangan dalam memahami kondisi aktual terkait sewa aset dan kewajiban perusahaan. Selain itu, perusahaan sering kali melebih-lebihkan jumlah kewajiban di luar neraca. IFRS 16 ini kemudian menjadi pembaruan dalam standar akuntansi sewa yang wajib diterapkan oleh entitas bisnis, terutama di negara-negara yang mengadopsi IFRS. Standar ini mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2019 (IASB, 2016).

Di Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, merupakan adopsi dari IFRS 16 yang mengatur tentang sewa. PSAK ini menggantikan beberapa standar sebelumnya, seperti PSAK 30 tentang sewa dan ISAK 30 mengenai sewa operasi. Tujuan utama penerapan standar ini adalah untuk memastikan bahwa baik penyewa maupun

pesewa dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih relevan sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan (IAI, 2020). Salah satu konsekuensi dari penerapan PSAK 73 adalah bahwa hampir seluruh transaksi sewa harus dibukukan sebagai sewa pembiayaan oleh penyewa. Penerapan ini dianggap lebih mencerminkan keadaan sebenarnya dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, dalam industri penerbangan, sebelum penerapan PSAK 73, perusahaan tidak mencatat pesawat sebagai aset dalam laporan keuangannya, sehingga rasio utang terhadap ekuitas tampak lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Padahal, perusahaan memiliki komitmen atau kewajiban untuk membayar sewa jangka panjang (Brama & Wahyana, 2019).

Penerbitan IFRS 16 mengubah secara signifikan pelaksanaan akuntansi sewa dalam laporan keuangan penyewa. Oleh karena itu, pada 18 September 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan PSAK 73 sebagai pengadopsian IFRS 16 mengenai sewa. Pemberlakuan PSAK 73 ini secara efektif dimulai pada 1 Januari 2020 dan menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PSAK 30. PSAK 73 memperkenalkan model akuntansi tunggal bagi penyewa, di mana mereka diwajibkan untuk mengakui aset hak guna (*right of use asset*) serta liabilitas sewa (*lease liabilities*). Penerapan standar ini menyamakan perlakuan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan bagi penyewa.

Sejak diberlakukannya PSAK 73, seluruh entitas bisnis di Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan standar penyajian laporan keuangannya, terutama dalam hal transaksi sewa-menyewa. Implementasi PSAK 73 di Indonesia, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2020, memberikan dampak yang signifikan terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan, terutama dalam sektor manufaktur yang banyak menggunakan aset tetap melalui skema sewa. Perubahan ini menyebabkan perusahaan harus mencatat aset dan kewajiban sewa yang sebelumnya tidak muncul dalam laporan keuangan. Hal ini berpengaruh terhadap berbagai indikator kinerja keuangan, seperti rasio profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan PSAK

73 terhadap kinerja keuangan sebelum dan sesudah diberlakukannya standar tersebut pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Penerapan PSAK 73 sangat penting dalam penyajian laporan keuangan karena menciptakan transparansi yang lebih baik dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dengan adanya standar ini, laporan keuangan dapat lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, menghindari distorsi informasi akibat kewajiban sewa yang tidak tercatat dalam neraca. Hal ini memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditur, dan regulator, dalam menilai posisi keuangan dan risiko yang dihadapi perusahaan. Bagi perusahaan, penerapan PSAK 73 juga memungkinkan manajemen untuk lebih akurat dalam perencanaan keuangan dan strategi bisnis jangka panjang.

Sejak tahun 2020, peraturan ini secara krusial mewajibkan seluruh entitas bisnis di Indonesia mematuhi standar dalam penyajian laporan keuangan para pebisnis berkaitan dengan sewa-menyewa. PSAK 73 secara dini dilaksanakan secara efektif per 1 Januari 2019 dan berlaku bagi pebisnis yang telah melaksanakan PSAK. Adapun PSAK 72 ini berisi tentang pendapatan yang diperoleh berdasarkan kontrak dengan pelanggan. Berdasarkan pedoman *Exposure Draft* PSAK 73 menjelaskan tentang PSAK 73 bahwa atas sewa berdasarkan model akuntansi bisa dilaporkan secara tunggal bagi penyewa yang disebut sebagai sewa pembiayaan dan bagi pesewa tidak ada aturan yang berubah secara signifikan, sehingga tidak adanya perubahan antara klasifikasi sewa jenis sewa pembiayaan ataupun sewa operasi.

Fenomena PSAK 73 dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan Nomorissa dan Lindrawati (2021) penelitian tersebut mengatakan bahwa Data statistik lembaga pembiayaan Indonesia tahun 2019 menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2019) menunjukkan bahwa jumlah aset yang dimiliki perusahaan pembiayaan adalah sebesar Rp518,138 triliun, lebih tinggi dibandingkan aset yang dimiliki perusahaan modal ventura sebesar Rp88,194 triliun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp16,649 triliun. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pendapatan operasional terbesar perusahaan pembiayaan

disumbangkan oleh sewa guna usaha (leasing) yaitu sebesar Rp65,574 triliun atau sebesar 69,41% dari total pendapatan operasional tahun 2019.

Fenomena pada perusahaan manufaktur mengatakan bahwa Pengungkapan pada CALK menyatakan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan metode retrospektif bagi setiap periode pelaporan sebelumnya yang disajikan sesuai PSAK 25 (IAI, 2015) tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan dengan diadopsinya PSAK 73 (IAI, 2017), perubahan kebijakan akuntansi PT Unilever Indonesia Tbk berdampak pada banyak hal dalam akuntansi sewa mereka. Entitas diharuskan mengakui liabilitas dan aset untuk semua sewa yang jangka waktunya lebih dari 12 bulan, dikecualikan jika aset tersebut bernilai rendah. Entitas sebagai penyewa mengakui aset hak guna yang mana merupakan hak penyewa untuk menggunakan aset yang mendasari perjanjian sewa dan liabilitas sewa yang mana merupakan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa. Beban sewa operasi yang sebelumnya diakui secara garis lurus, kini berubah menjadi beban penyusutan untuk aset hak-guna dan beban bunga dari liabilitas sewa entitas. PT Unilever Indonesia Tbk menyewa tanah dan bangunan untuk ruang kantor dan Gudang. Sewa ruang kantor secara umum berlaku untuk 3 – 5 tahun periode, dan untuk gudang berlaku untuk 1 – 3 tahun periode. Beberapa sewa memasukkan opsi untuk memperbaharui periode sewa untuk durasi yang sama setelah kontrak berakhir. PT Unilever Indonesia Tbk menyewa kendaraan dan peralatan, dengan periode 3 – 5 tahun. PT Unilever Indonesia Tbk juga menyewa peralatan IT dan mesin dengan periode kontrak 3 tahun

Setelah disajikan kembali secara komparatif untuk saldo pada 1 Januari serta 31 Desember 2018, aset hak guna pada PT Unilever Indonesia Tbk mengalami penurunan 12,61%, diikuti dengan liabilitas sewa yang juga mengalami penurunan 9,1% pada periode 31 Desember 2018. Dengan penerapan secara retrospektif, pengguna laporan keuangan dapat membandingkan dengan jelas angka-angka pada laporan keuangan dan menganalisis keterkaitannya karena telah dilakukan penyesuaian untuk periode-periode sebelumnya. Sehingga, untuk menentukan hubungan pada pos pos tertentu dalam laporan keuangan dapat menggunakan analisis perbandingan internal. Meskipun secara komparatif disajikan persentase

terhadap aset hak guna dan liabilitas sewa mengalami penurunan, namun hasil menunjukkan dampak yang berbeda pada aset dan liabilitas pada kondisi sebelum dan setelah penerapan PSAK 73. Setelah mengumpulkan dan mengolah data laporan keuangan untuk periode 31 Desember 2018 pada kondisi sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73, dalam studi kasus ini menunjukkan bahwa nilai total aset yang bertambah karena adanya pengakuan pos akun baru aset hak guna. PT Unilever menunjukan kenaikan total aset sebesar 3,96%. Hal ini juga memiliki pengaruh pada total liabilitas yang naik sebesar 7,7% karena adanya pengakuan liabilitas sewa. Sesuai dengan latar belakang diterbitkannya PSAK 73, standar ini bertujuan untuk memberikan penyajian transaksi penyewaan yang tepat secara utuh dimana sebelumnya disajikan secara *off-balanced-sheet*

PT Unilever Indonesia Tbk mengalami peningkatan Debt To Aset sebesar 2,51% yang menggambarkan bahwa aset perusahaan lebih banyak didanai oleh hutang. Berimplikasi positif juga, Debt To Equity yang mengalami peningkatan 17,79% mengindikasikan perusahaan menggunakan lebih banyak hutangnya daripada menerbitkan saham. Dari sisi rasio profitabilitas, dalam mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas, PT Unilever Indonesia Tbk mengalami penurunan Return On Aset sebesar 1,57% yang menggambarkan total aset yang bertambah dikarenakan pencatatan sewa tidak berpengaruh positif pada penambahan laba. Perusahaan mengalami kenaikan 2,33% pada Return On Equity yang memiliki implikasi positif karena adanya penerapan ini PSAK 73 (Firmansyah, 2020)

Penelitian mengenai implementasi PSAK 73 mengenai sewa sudah banyak dilakukan diantaranya : penelitian yang dilakukan oleh Safitri, et al (2018) mengatakan bahwa terdapat dampak kapitalisasi sewa terbesar dalam industry manufaktur, penelitian yang dilakukan oleh Nomorissa dan Lindrawati (2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset, liabilitas, beban bunga, dan laba bersih perusahaan jasa mengalami peningkatan, ekuitas dan beban operasional perusahaan jasa mengalami penurunan, rasio ROA, rasio ROE, rasio DAR, dan rasio DER, mengalami peningkatan setelah penerapan PSAK 73 atas Sewa, kemudian penelitian selanjutnya terkait dengan PSAK 73 adalah penelitian Saing dan

Firmansyah (2018) yang mengatakan bahwa penerapan PSAK 73 berdampak pada peningkatan item aset dan liabilitas. Kenaikan *debt to asset ratio*, *debt to equity ratio* dapat meningkatkan biaya modal yang ditanggung perusahaan, meskipun di sisi lain return on assets dan return on equity mengalami peningkatan.

Penelitian mengenai PSAK 73 terhadap kinerja keuangan sangat penting dilakukan Dalam pandangan ilmu akuntansi, tujuan dibuatnya PSAK 73 adalah agar bisa mengubah pembukuan atas transaksi sewa yang ada di sisi penyewa atau lease itu sendiri. Menerapkan kebijakan ini tidak serta-merta bisa membawa perubahan pembukuan untuk pihak yang memberikan hak sewa. Untuk itu, tujuannya dibentuk PSAK 73 adalah sebagai pelaporan model akuntansi tunggal, yang mana diperuntukkan pada pihak penyewa dengan cara mengklasifikasikan sewa tersebut sebagai pembiayaan ataupun *capital lease*.

Berdasarkan fenomena diatas dan juga hasil dari penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti ulang disamping itu, penelitian mengenai dampak dari PSAK 73 belum banyak dilakukan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Fauzi dan Yustiani (2021) yang berjudul Dampak Implementasi Psak 73 Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia dengan mengubah subjek penelitian mejadi perusahaan manufaktur periode 2019-2021. alasan peneliti mnegambil perusahaan manufakur adalah karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki produksi yang berkesinambungan sehingga diperlukan pengelolaan modal dan aktiva yang baik sehingga menghasilkan profit yang besar untuk memberikan kembalian investasi yang besar pula sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalny Maka penelitian ini berjudul **“DAMPAK PENERAPAN PSAK 73 MENGENAI SEWA TERHADAP KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENGARUH PSAK 73 (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2019-2021)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Pada dasarnya ruang lingkup adalah batasan sebuah masalah yang diteliti yang merupakan batasan dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdapat di bursa efek Indonesia. Sebelum dan sesudah diterapkanya PSAK 73.

Menurut Menurut PSAK 30, sewa pembiayaan (*capital lease*) terjadi apabila terdapat pengalihan secara substansial terkait risiko dan manfaat aset, dan atas sewa tersebut entitas mengakui dan mencatatnya pada laporan posisi keuangan sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa (Mashuri dan Sari, 2021) dan Salah satu pengaruh sesudah implementasi PSAK 73 tersebut mempunyai dampak dalam hal pencatatan transaksi sewa dari sisi lessee (penyewa).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian yakni: apakah terdapat sewa perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui sewa perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang akurat dan relevan serta dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai berikut :

1. Untuk Investor

Diharapkan dapat menjadi informasi bagi investor untuk yang ingin melakukan penerapan PSAK 73

2. Bagi Perusahaan

Manfaat bagi perusahaan adalah dapat memberikan pengetahuan kepada perusahaan tentang dampak atas diterapkannya PSAK 73 mengenai sewa terhadap kinerja keuangan

3. Untuk Para Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi, dan wawasan teori tentang dampak penerapan PSAK 73 mengenai sewa terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang secara umum, ruang lingkup/batasan penelitian yang membatasi permasalahan, tujuan dan manfaat dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran dari keseluruhan bab.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulisan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada bab III

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis berusaha untuk menarik beberapa kesimpulan penting dari semua uraian dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan penelitian.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atas uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat berbentuk tabel dan gambar.